

STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN MENURUT IBNU Kholdun DALAM KITAB MUQADDIMAH DAN RELEFANSINYA DI INDONESIA

Hanief Sirajul Huda
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Isris Samarinda
haniefsirajulhuda@gmail.com

ABSTRAK

Masalah kemiskinan selalu mendapat perhatian utama di dunia, terutama untuk negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Ini terjadi karena kesadaran pemerintah yang lambat dan kegagalan untuk mengatasi masalah kemiskinan akan menyebabkan munculnya berbagai masalah sosial, ekonomi dan politik di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal sumber daya manusia dimana konsep pengembangan manusia terkait dengan bagaimana memperluas pilihan manusia, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan daya beli. Atas dasar hubungan yang berlawanan ini, negara dengan kualitas pembangunan manusia yang baik idealnya memiliki persentase orang miskin yang rendah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menjabarkan teori model pembangunan Ibn Khaldun dalam mengatasi kemiskinan. Ibn Khaldun berpendapat perkembangan atau penurunan ekonomi pada masyarakat tidak tergantung pada satu faktor saja, tetapi lebih pada interaksi faktor moral, sosial, ekonomi, politik dan historis selama periode waktu yang lama.

Kata Kunci: Model Pembangunan Ibnu Khaldun, Kemiskinan, Muqaddimah

ABSTRACT

The problem of poverty always gets the main attention in the world, especially for countries that are predominantly Muslim. This happens because the government's slow awareness and failure to overcome the problem of poverty will cause a variety of social, economic and political problems in the midst of society. In terms of human resources where the concept of human development is related to how to expand human choices, especially to meet basic needs such as health, education and purchasing power. On the basis of this conflicting relationship, a country with good quality human development ideally has a low percentage of poor people. This study uses qualitative methods that describe Ibn Khaldun's development model theory in overcoming poverty. Ibn Khaldun argues that economic development or decline in society does not depend on just one factor, but rather on the interaction of moral, social, economic, political and historical factors over a long period of time.

Keywords: Ibnu Khaldun Development Model, Poverty, Muqaddimah

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu fenomena ekonomi yang kompleks dan sering kali dianggap sebagai masalah kronis di berbagai negara, terutama di negara-negara berkembang. Kondisi ini bukan hanya sekadar permasalahan material, melainkan juga mencakup berbagai aspek sosial, politik, dan budaya yang saling berkaitan. Meskipun berbagai strategi dan kebijakan telah diimplementasikan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini, kemiskinan tetap menjadi masalah yang sulit dipecahkan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan (Aziz, A., & Husenudin, A. 2024: 1453).

Kondisi kemiskinan di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim sering kali lebih memprihatinkan dibandingkan dengan negara-negara Barat yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Ketimpangan ini dapat dilihat dari berbagai indikator, termasuk tingkat pendapatan, akses

terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa negara-negara Islam menghadapi tantangan besar dalam mengatasi kemiskinan, yang tidak hanya terbatas pada masalah ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan struktural (Aziz, A., & Firmansyah, R. 2024: 28).

Menurut kajian Djumiarti, beberapa permasalahan yang signifikan dihadapi oleh negara-negara Islam mencakup kemiskinan absolut, tingkat pengangguran yang tinggi, ketimpangan distribusi pendapatan, rendahnya produktivitas di sektor primer, serta peningkatan ketimpangan standar hidup. Selain itu, kurang optimalnya pemenuhan fasilitas publik seperti pendidikan dan kesehatan, memburuknya neraca pembayaran, tingginya utang luar negeri, dan melemahnya struktur kelembagaan juga menjadi faktor penghambat utama dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pengaruh eksternal yang semakin kuat turut memperlemah sistem nilai dan kebiasaan tradisional, yang pada akhirnya memperburuk kondisi kemiskinan di negara-negara tersebut (Djumiarti, T. 2005: 34).

Kegagalan beberapa teori pembangunan Barat, seperti yang diusulkan oleh Adam Smith, Todaro, dan Ricardo, menunjukkan bahwa pendekatan ekonomi konvensional belum mampu memberikan solusi efektif dalam menangani masalah kemiskinan. Teori-teori ini, meskipun memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu ekonomi, sering kali kurang memperhatikan aspek spiritual dan moral, yang justru menjadi salah satu pilar penting dalam pandangan Islam. Dalam perspektif Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur dari sisi material semata, tetapi juga mencakup keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual (Affandi, Akhmad., & Astuti, Dewi Puji. 2013: 138).

Maka, penting untuk mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dalam upaya pengentasan kemiskinan, dengan menggabungkan nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonomi. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada keadilan sosial, distribusi kekayaan yang adil, dan pembangunan manusia secara keseluruhan. Dalam hal ini, pandangan Ibnu Khaldun tentang ekonomi dan pembangunan menawarkan wawasan yang relevan untuk diterapkan dalam konteks modern.

Ibnu Khaldun, seorang pemikir Muslim terkemuka, telah menawarkan pandangan yang mendalam tentang konsep pembangunan dan pengentasan kemiskinan lebih dari enam abad yang lalu. Dalam karyanya yang fenomenal, *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun tidak hanya membahas prinsip-prinsip ekonomi dengan cermat, tetapi juga menyoroti pentingnya faktor sosial, budaya, dan moral dalam pembangunan ekonomi. Ia menekankan pentingnya solidaritas sosial dan peran negara dalam memastikan distribusi kekayaan yang adil dan merata (Khaldun, I. 2011: 1134).

Pentingnya membangkitkan kembali teori pengentasan kemiskinan ala Ibnu Khaldun terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan aspek-aspek material dan spiritual dalam pandangan ekonomi. Dengan pendekatan ini, tujuan pembangunan tidak hanya terbatas pada peningkatan pendapatan dan produksi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pandangan ini relevan untuk mengatasi tantangan kemiskinan yang dihadapi oleh negara-negara Muslim saat ini.

Para ekonom kontemporer terus berupaya mengidentifikasi solusi yang tepat untuk mengatasi kemiskinan. Mereka mencari inspirasi dari berbagai sumber, termasuk pemikiran klasik seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun. Dengan mengeksplorasi dan mengaplikasikan konsep-

konsep ekonomi yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun, diharapkan dapat ditemukan pendekatan baru yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan kemiskinan di dunia modern. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkaya wacana ekonomi Islam, tetapi juga memberikan solusi yang lebih berkelanjutan dan manusiawi dalam upaya pengentasan kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono, studi kepustakaan berhubungan erat dengan kajian teoritis serta referensi lainnya yang berhubungan dengan nilai, budaya, dan norma yang berlaku dalam situasi sosial yang sedang diteliti (Sugiyono 2007: 57). Studi kepustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses penelitian, karena penelitian tidak dapat dipisahkan dari literatur ilmiah (Ansori, M. A. Z., Aziz, A., Irmansyah, D., Wati, I., Rahmi, D. A., Latiepah, N. R. P., & Ramadhan, M. A. 2024: 9). Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka untuk mengkaji strategi pengentasan kemiskinan menurut Ibnu Khaldun sebagaimana dijelaskan dalam karya monumentalnya, "Muqaddimah", serta relevansinya dalam konteks Indonesia. Metode studi pustaka dipilih untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur terkait, baik yang bersumber dari kitab asli Ibnu Khaldun maupun dari kajian-kajian ilmiah lainnya yang membahas pemikirannya tentang ekonomi dan kemiskinan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan prinsip-prinsip dasar yang diusulkan oleh Ibnu Khaldun dalam mengatasi kemiskinan, serta mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diadaptasi dan diterapkan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Data yang dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai relevansi dan implementasi strategi-strategi tersebut dalam konteks sosial-ekonomi modern di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun, yang memiliki nama lengkap Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrawi, dikenal dengan sebutan Waliyuddin Abu Zaid dan Qadi al-Qudat. Lahir pada tanggal 1 Ramadhan 732 H atau 27 Mei 1332 M di Tunisia, Ibnu Khaldun berasal dari keluarga yang bermazhab Maliki. Beliau adalah seorang muhadis al-Hafidz, ahli ushul fiqh, sejarawan, pengembara, penulis, dan sastrawan. Dalam lingkungan keluarganya, ia sering dipanggil dengan nama Ibnu Zaid, sementara di masa kecil dikenal dengan nama Abdurrahman. Gelar Waliyuddin diberikan kepada Ibnu Khaldun saat menjabat sebagai hakim (qadi) di Mesir, dan gelar 'alamah yang tersemat di depannya menunjukkan tingkat keilmuan tertinggi yang dimilikinya. Sebutan-sebutan lain seperti Rais, al-Hajib, al-Shadrul, al-Kabir, al-Faqih, al-Jalil, dan Imamul A'immah, menunjukkan status intelektualnya. Nama belakangnya, al-Maliki, merujuk kepada mazhab yang diikuti dalam fiqh, yaitu Mazhab Maliki yang didirikan oleh Imam Malik bin Anas (Bernard Lewis, et. al., 1971: 825.).

Asal-usul keluarga Ibnu Khaldun dapat ditelusuri hingga Hadramaut. Ketika semenanjung Iberia (Spanyol) dikuasai oleh Muslim Arab pada abad ke-8, nenek moyang Ibnu Khaldun bermigrasi ke Seville. Keluarga ini dikenal sebagai pendukung dinasti Umayyah dan selama berabad-abad

memegang posisi penting dalam politik di Spanyol. Namun, setelah Seville jatuh ke tangan Kristen pada tahun 1248 M, keluarga ini pindah ke Maroko dan akhirnya menetap di Tunisia, di mana mereka diberi tanah oleh dinasti Hafsiyah. Ayah Ibnu Khaldun, Abu Abdullah Muhammad, meninggal pada tahun 749 H/1348 M akibat wabah pes yang melanda Afrika Utara. Pada saat itu, Ibnu Khaldun masih berusia 18 tahun. Ayahnya, seorang ahli bahasa dan sastra Arab, telah meninggalkan karir politiknya untuk mendalami ilmu agama dan tasawuf. Ia dikenal sebagai seorang yang mahir dalam syair sufi dan berbagai bidang keilmuan lainnya (Abdullah Mustafa al-Maraghi 2001: 287).

Pada abad ke-13, kerajaan Muwahhidun di Andalusia mengalami kehancuran, dengan beberapa kota dan pelabuhan jatuh ke tangan Raja Castilia, termasuk Seville pada tahun 1248 M. Akibatnya, Bani Khaldun pindah ke Afrika Utara, seperti halnya Bani Hafs, dan menetap di kota Ceuta. Mereka kemudian mengangkat Abu Bakar Muhammad, kakek Ibnu Khaldun, untuk mengelola urusan negara di Tunisia, dan kakek pertamanya, Muhammad bin Abu Bakar, untuk mengelola urusan pemerintahan di Bougie. Ibnu Khaldun menghabiskan 18 tahun masa pendidikannya di Tunisia, dari tahun 1332 hingga 1350 M. Pendidikan awalnya dimulai dengan menghafal Al-Qur'an, mengikuti tradisi yang lazim pada masa itu. Ia menerima pendidikan ketat dari ayahnya sebagai guru pertamanya, sebelum belajar dari para ulama terkemuka di berbagai bidang, termasuk bahasa Arab, tafsir Al-Qur'an, hadis, ilmu tauhid, fiqh, filsafat, dan ilmu hitung (Ali Audah 1982: 26).

Di usia muda, Ibnu Khaldun telah menguasai beberapa disiplin ilmu klasik Islam, termasuk 'ulum aqliyah (ilmu-ilmu filsafat, tasawuf, dan metafisika). Dalam bidang hukum, ia menganut mazhab Maliki. Selain itu, ia juga mempelajari politik, sejarah, ekonomi, geografi, dan banyak lagi. Banyak tokoh dan ulama besar yang menjadi muridnya, seperti Ibnu Marzuq al-Hafidz, al-Damamini, al-Busili, al-Bisati Ibnu Ammar, dan Ibnu Hajar. Ibnu Khaldun juga mempelajari kitab-kitab penting seperti al-Muwatta' karya Imam Malik di bawah bimbingan Abdullah Muhammad bin Abdussalam. Ilmu-ilmu rasional seperti filsafat, teologi, logika, ilmu alam, matematika, dan astronomi ia pelajari dari Abu 'Abdillah Muhammad bin Ibrahim al-Abili. Para gurunya sering kali mengagumi kecerdasan dan kemampuan Ibnu Khaldun dalam memahami materi yang diajarkan (Ali Abdul Wakhid Wafi 1985: 27).

Dari banyak gurunya, Ibnu Khaldun memberikan penghormatan khusus kepada dua orang, yaitu Abu Muhammad bin Abdul Muhaimin al-Hadhramy, yang dikenal sebagai imam ahli hadis dan bahasa di Maroko, serta Abu 'Abdillah Muhammad bin al-Abili, yang mengajarnya filsafat, logika, biologi, matematika, astronomi, dan musik. Kedua guru ini memiliki pengaruh besar dalam pembentukan intelektual Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun juga aktif mempelajari berbagai karya ulama besar bersama gurunya. Beberapa kitab yang ia pelajari termasuk al-Lamiah fi al-Qiraat dan Raiah fi Rasmi Mushaf karya al-Syathiby, Tashi fi Nahwi karya Ibnu Malik, dan Kitab al-Aghani karya Abi Faraj al-Isfahani. Ia juga mempelajari kitab hadis seperti Shahih Muslim dan Mutawatha' karya Imam Malik, serta berbagai kitab lain dalam bidang fikih dan usul fiqh (Ahmad Syafi'I Ma'arif 1996: 12).

Pada tahun 749 H, Tunisia dilanda wabah pes yang sangat mematikan, menyebabkan Ibnu Khaldun kehilangan orang tua dan beberapa gurunya. Kejadian ini membuat Ibnu Khaldun mengalami kesulitan dalam melanjutkan pendidikannya. Wabah tersebut menyebabkan banyak ulama dan sastrawan hijrah dari Tunisia, termasuk Ibnu Khaldun yang kemudian mengikuti mereka ke Fez, Maroko pada tahun 1354 M untuk melanjutkan studinya. Di Maroko, Ibnu Khaldun belajar dari berbagai ulama terkenal seperti Muhammad bin al-Saffar, Muhammad bin Muhammad al-

Maqqari, dan lainnya. Banyak dari ulama-ulama ini yang kemudian menjadi muridnya. Karya-karya Ibnu Khaldun sangat terkenal dan berpengaruh, termasuk "Syarh al-Burdah," berbagai ringkasan atas buku-buku Ibnu Rusyd, buku tentang matematika, usul fiqh, dan sejarah (Khaldun, I. 2011: 1080).

Karya monumental Ibnu Khaldun yang paling terkenal adalah "Al-Ibar wa Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar fi Tarikh al-Arab wa al-Ajam wa al-Barbar," sebuah buku sejarah yang menunjukkan penguasaan Ibnu Khaldun atas sejarah dan berbagai disiplin ilmu. Selain itu, "al-Muqaddimah" juga menjadi salah satu karya penting yang menjadi pusat kajian para ilmuwan. Ibnu Khaldun menghabiskan masa kecil dan awal masa mudanya di Tunisia, di mana ia terlibat dalam kegiatan intelektual dan politik. Sebagai bagian dari keluarga elit, ia memiliki akses ke lingkaran intelektual dan politik sejak dini. Ayahnya yang pernah menjadi administrator dan perwira militer, akhirnya memilih untuk fokus pada ilmu pengetahuan, hukum, teologi, dan sastra sebelum wafat karena wabah pes (Muhsin Mahdi 1971: 29).

Sebelum menulis "al-Muqaddimah," Ibnu Khaldun telah terlibat dalam dunia politik, sebuah dunia yang penuh dengan intrik dan persaingan. Ia menyaksikan sendiri bagaimana politik saat itu lebih sering diwarnai oleh persaingan kekuasaan daripada nilai moral. Pengalaman ini memberinya wawasan mendalam tentang dinamika kekuasaan dan struktur sosial, yang kemudian dituangkan dalam karya-karyanya. Pada usia 20 tahun, Ibnu Khaldun diangkat menjadi sekretaris Sultan Abu Inan dari Fez, Maroko. Namun, ia sempat dipenjarakan selama 21 bulan karena dicurigai sebagai pengkhianat. Setelah dibebaskan, ia tetap aktif dalam politik dan sempat kembali ke Granada di Spanyol pada tahun 1362 M. Pengalaman politik dan pengamatannya terhadap dinasti-dinasti kecil yang saling bersaing memberi Ibnu Khaldun wawasan mendalam tentang perubahan sosial dan politik (Abdullah Mustafa al-Maraghi 2001: 287).

Dalam bidang ekonomi, Ibnu Khaldun dikenal sebagai salah satu pemikir terbesar. Ia sering disebut sebagai Bapak Sosiologi dan Bapak Ekonomi, karena teorinya tentang ekonomi yang mendahului para pemikir Barat modern seperti Adam Smith dan Ricardo. Ibnu Khaldun telah mengembangkan pemikiran tentang mekanisme pasar, keuangan publik, kebijakan fiskal, dan moneter yang jauh sebelum zamannya, menunjukkan kedalaman analisisnya terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat (Ismail R. Al-Faruqi 1986: 310).

2. Strategi Pengentasan Kemiskinan menurut Ibnu Khaldun dalam kitab Muqodimah

Ibn Khaldun, seorang cendekiawan Muslim terkenal, menjadikan konsep kesejahteraan sebagai fokus utama dalam analisisnya. Dalam karyanya yang terkenal, *Muqaddimah*, ia menyoroti bahwa fenomena naik turunnya suatu peradaban atau dinasti tidak semata-mata bergantung pada variabel ekonomi saja. Sebaliknya, Khaldun menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor lain yang turut mempengaruhi, yang mencakup aspek individu, masyarakat, otoritas, dan institusi. Dalam analisisnya, Khaldun memperluas cakupan faktor-faktor yang berpengaruh dengan mengintegrasikan aspek moral dan fenomena psikologis. Menurutnya, kualitas moral dan keadaan psikologis individu dan masyarakat memainkan peran penting dalam menentukan stabilitas dan keberlanjutan suatu peradaban. Oleh karena itu, ia melihat moralitas dan psikologi sebagai faktor-faktor integral yang perlu dipertimbangkan dalam analisis fenomena sosial dan politik (Ismail R. Al-Faruqi 1986: 312).

Selain faktor moral dan psikologis, Khaldun juga menekankan peran penting dari aspek politik,

ekonomi, dan sosial dalam mempengaruhi naik turunnya peradaban. Ia mengamati bahwa kekuatan politik dan struktur pemerintahan yang adil serta kebijakan ekonomi yang baik adalah pilar-pilar utama yang dapat menjaga kesejahteraan suatu masyarakat. Dengan demikian, dinamika politik dan ekonomi dipandang sebagai faktor kunci yang harus dianalisis untuk memahami keberlanjutan suatu dinasti atau peradaban. Lebih lanjut, Khaldun juga memasukkan faktor demografi dan sejarah dalam analisisnya, yang ia pandang sebagai elemen penting dalam menentukan perubahan sosial dan politik. Ia menilai bahwa perubahan demografis, seperti pertumbuhan atau penurunan populasi, serta peristiwa sejarah yang signifikan, dapat mempengaruhi arah perkembangan suatu peradaban. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, Khaldun mampu memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika dan kompleksitas yang terlibat dalam fenomena naik turunnya peradaban.

Dalam pandangan Ibn Khaldun, sejarah dipahami melalui analisis hubungan sebab-akibat untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip yang mendasari naik turunnya dinasti, negara (dawlah), atau peradaban (umran) di dunia Muslim. Karyanya, *Muqaddimah*, menampilkan analisis mendalam dan perspektif orisinal mengenai pola-pola historis dan sosial ini. Menurut Ibn Khaldun, pemahaman tentang sejarah memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosial yang saling berinteraksi (Chapra, M.U. 2001: 126).

Ibn Khaldun merangkum teorinya tentang kekuasaan dan peradaban dalam beberapa prinsip dasar yang diajukan sebagai panduan bagi para penguasa. Prinsip pertama menyatakan bahwa kekuatan kedaulatan (al-mulk) tidak dapat terwujud tanpa penerapan syariah. Syariah dianggap sebagai landasan moral dan hukum yang memberikan legitimasi kepada kekuasaan. Tanpa penerapan syariah, kekuasaan dianggap kehilangan arah dan legitimasi.

Selanjutnya, Ibn Khaldun menegaskan bahwa penerapan syariah hanya dapat dilakukan oleh otoritas kedaulatan yang kuat (al-mulk). Dalam pandangannya, kedaulatan yang kuat berfungsi sebagai penjaga hukum dan ketertiban, serta pelindung syariah dalam masyarakat. Oleh karena itu, kedaulatan yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa syariah dapat ditegakkan secara efektif.

Kekuatan kedaulatan sendiri, menurut Ibn Khaldun, bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia (al-rijal). Tanpa adanya sumber daya manusia yang memadai, kedaulatan tidak dapat berfungsi dengan efektif. Sumber daya manusia ini mencakup para pejabat, tentara, dan individu-individu lain yang terlibat dalam administrasi dan pertahanan negara.

Namun, sumber daya manusia ini tidak akan bertahan lama tanpa dukungan kekayaan (al-mal). Kekayaan dianggap sebagai sarana penting untuk membiayai operasi negara, termasuk gaji untuk pegawai negeri dan militer, serta untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur. Kekayaan juga berperan dalam memperkuat stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.

Ibn Khaldun lebih lanjut menekankan bahwa kekayaan hanya dapat diperoleh melalui pembangunan (al-imarah). Pembangunan di sini mengacu pada kegiatan ekonomi produktif yang menghasilkan kekayaan bagi masyarakat dan negara. Tanpa pembangunan yang efektif, negara tidak akan mampu mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan dan mendukung kebijakan publik.

Pembangunan, pada gilirannya, tidak akan terjadi tanpa adanya keadilan (al-adl). Keadilan dianggap sebagai prinsip dasar yang harus ditegakkan oleh negara untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial. Dalam pandangan Ibn Khaldun, keadilan adalah ukuran yang digunakan Allah untuk mengevaluasi manusia dan masyarakat.

Akhirnya, Ibn Khaldun menyimpulkan bahwa kedaulatan membawa tanggung jawab untuk menegakkan keadilan. Penguasa memiliki peran kunci dalam menciptakan dan memelihara keadilan sebagai fondasi bagi pembangunan dan kemakmuran. Tanpa komitmen terhadap keadilan, kekuasaan cenderung menuju kehancuran, karena kehilangan dukungan dari rakyat dan menimbulkan ketidakstabilan sosial.

Kumpulan nasihat yang disajikan terdiri dari delapan prinsip kebijakan politik yang diajukan oleh Ibnu Khaldun. Prinsip-prinsip ini dikenal dengan sebutan “*eight wise principles*” dalam bahasa Inggris, atau “*kalimah hikammiyah*” dalam bahasa Arab. Konsep ini merangkum sejumlah petunjuk strategis yang dirumuskan untuk mengarahkan kebijakan politik yang efektif. Setiap nasihat dalam kumpulan tersebut saling terkait satu sama lain, membentuk jaringan hubungan yang bersifat mutual. Hal ini menciptakan sebuah sistem di mana setiap prinsip berfungsi secara harmonis dan saling melengkapi dalam kerangka kebijakan politik (Khaldun, I. 2011: 403).

Prinsip-prinsip ini tidak hanya terhubung secara individual tetapi juga membangun suatu alur timbal balik. Interaksi antara nasihat-nasihat ini menciptakan sebuah struktur yang terintegrasi, di mana satu nasihat dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh nasihat lainnya. Dengan demikian, proses penerapan prinsip-prinsip ini bersifat holistik dan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan rangkaian nasihat. Penggunaan salah satu prinsip tanpa mempertimbangkan hubungan dengan prinsip-prinsip lainnya dapat mengurangi efektivitas keseluruhan.

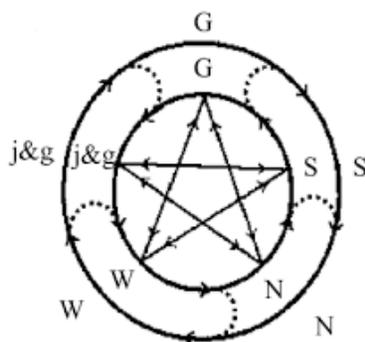
Keterkaitan antara setiap nasihat menjadikan alur penerapan prinsip-prinsip ini sebagai suatu siklus yang berkelanjutan. Ini menciptakan sebuah dinamika di mana kebijakan politik yang diusulkan tidak hanya berdasarkan pada prinsip tunggal tetapi pada integrasi keseluruhan dari semua prinsip tersebut. Prinsip-prinsip ini, dalam konteks implementasinya, harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang dinamis. Pendekatan ini menekankan pentingnya sinergi antara nasihat-nasihat tersebut dalam mencapai tujuan kebijakan politik yang lebih besar.

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang interkoneksi antara prinsip-prinsip ini menjadi sangat penting. Hal ini memastikan bahwa implementasi kebijakan politik dapat berjalan dengan lancar dan efektif sesuai dengan panduan yang diberikan oleh Ibnu Khaldun. Secara keseluruhan, delapan prinsip kebijakan politik Ibnu Khaldun membentuk sebuah sistem yang terstruktur dan terintegrasi. Prinsip-prinsip ini menyediakan landasan yang kokoh untuk pengembangan dan pelaksanaan kebijakan politik yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam *kalimah hikammiyah*, tampak jelas karakter multidisiplin dan dinamis dari analisis yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun. Analisis ini menunjukkan keterkaitan erat antara berbagai variabel sosial, ekonomi, dan politik. Ibnu Khaldun menghubungkan berbagai elemen penting, termasuk otoritas kedaulatan atau politik (G), kepercayaan dan aturan perilaku atau syariah (S), serta sumber daya manusia atau masyarakat (N).

Variabel-variabel tersebut saling berinteraksi secara kompleks dan saling mempengaruhi. Otoritas politik atau kedaulatan (G) berperan dalam pembentukan dan pengaturan struktur masyarakat, sedangkan kepercayaan dan aturan perilaku atau syariah (S) mempengaruhi norma dan perilaku sosial. Sumber daya manusia atau masyarakat (N) juga memainkan peranan penting dalam pembentukan dinamika sosial.

Gambar: Model dinamik Ibnu Kholdun dalam pengentasan kemiskinan



Sumber: Khaldun, I. 2011

Di sisi lain, kekayaan atau stok sumber daya (W) berfungsi sebagai basis material untuk pembangunan dan kemajuan. Pembangunan (g) yang terjadi dalam masyarakat bergantung pada ketersediaan sumber daya dan kemampuannya untuk dikelola dengan baik. Pembangunan ini pada gilirannya berpengaruh pada keadilan (j) yang terwujud dalam distribusi dan penggunaan sumber daya.

Keadilan (j) merupakan hasil dari interaksi antara berbagai variabel yang terlibat dalam analisis. Setiap elemen dalam model ini mempengaruhi dan dipengaruhi oleh elemen lainnya dalam suatu siklus yang saling bergantung. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pada satu variabel dapat memengaruhi variabel lainnya, menciptakan sebuah jaringan kompleks yang terus berubah.

Teori ini menggambarkan bagaimana berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik saling terkait dan memengaruhi satu sama lain dalam konteks pembangunan masyarakat. Keterkaitan ini tidak bersifat linear, melainkan berbentuk siklus yang saling berinteraksi dan dinamis. Oleh karena itu, analisis Ibnu Khaldun memerlukan pendekatan yang holistik dan integratif. *Kalimah hikammiyah* ini sering disebut sebagai teori model pembangunan Ibnu Khaldun. Model ini menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dinamika masyarakat dan proses pembangunan. Melalui pendekatan ini, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana berbagai faktor berkontribusi terhadap perubahan sosial dan ekonomi (Chapra, M.U., 2000: 170).

Analisis yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun memberikan kontribusi penting terhadap studi pembangunan dan sosiologi. Dengan menghubungkan berbagai variabel kunci, Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tunggal, tetapi oleh interaksi kompleks antara berbagai elemen.

Dalam konteks penelitian ilmiah, pemahaman terhadap model ini dapat memperkaya analisis terhadap fenomena sosial dan ekonomi. Pendekatan multidisiplin dan dinamis dari Ibnu Khaldun menawarkan perspektif yang berharga untuk mengeksplorasi hubungan antar variabel dan dampaknya terhadap pembangunan masyarakat.

3. *Kalimah Hikammiyah* dalam *Al Muqoddimah*

Kumpulan nasihat yang disajikan terdiri dari delapan prinsip kebijakan politik yang diajukan oleh Ibnu Khaldun. Prinsip-prinsip ini dikenal dengan sebutan "*eight wise principles*" dalam bahasa Inggris, atau "*kalimah hikammiyah*" dalam bahasa Arab. Konsep ini merangkum sejumlah petunjuk strategis yang dirumuskan untuk mengarahkan kebijakan politik yang efektif. Setiap nasihat dalam

kumpulan tersebut saling terkait satu sama lain, membentuk jaringan hubungan yang bersifat mutual. Hal ini menciptakan sebuah sistem di mana setiap prinsip berfungsi secara harmonis dan saling melengkapi dalam kerangka kebijakan politik (Khalidun, I. 2011: 403).

l. Sumber Daya Manusia atau Masyarakat (N)

Pusat analisis Ibn Khaldun adalah manusia. Karena naik turunnya peradaban sangat tergantung pada kesejahteraan atau kesengsaraan rakyat. Hal ini, pada gilirannya, tergantung tidak hanya pada variabel ekonomi tetapi juga pada peran faktor moral, kelembagaan, psikologis, politik, sosial dan demografis yang saling terkait erat melalui proses sebab-akibat melingkar yang memanjang selama periode sejarah yang panjang (Rosenthal, F., 1967: 19). Penekanan pada manusia ini sejalan dengan ajaran Alquran yang menyatakan bahwa:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

"Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia"(Surat Ar-Ra'd Ayat 11). Dan dalam Surat Ar-Rum Ayat 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)"(Surat Ar-Rum Ayat 41).

Dua ayat ini bersamaan dengan banyak ayat lainnya menekankan peran manusia itu sendiri dalam kebangkitan dan kejatuhannya. Inilah sebabnya mengapa semua utusan Allah (termasuk Ibrahim, Musa, Yesus dan Muhammad) datang ke dunia ini untuk berdakwah kepada manusia dan pemerintahan yang mempengaruhi perilaku mereka.

Karena itu, perlu mengubah individu menjadi manusia yang lebih baik. Perhatian maksimal perlu diberikan pada pendidikan dan peningkatan sosial ekonomi. Hanya peningkatan kemampuan membaca dan menulis mungkin tidak cukup. Penting juga untuk meningkatkan moral individu, yang biasanya diabaikan oleh ekonomi neoklasik, meningkatkan moral individu sangat diperlukan. Meningkatkan moral akan membantu menciptakan kualitas kejujuran, integritas, dan kesadaran yang diperlukan untuk mempromosikan pembangunan. Sehingga dapat menjadi salah satu faktor pengaruh salam menangani kemiskinan.

m. Peran Pembangunan (G) Dan Keadilan (J)

Jika manusia adalah pusat analisis, maka pembangunan dan keadilan menjadi mata rantai paling penting dalam rantai sebab-akibat. Pembangunan itu penting karena ketergantungan masyarakat agar tidak berhenti dalam kekurangan, agar masyarakat termotivasi untuk melakukan yang terbaik. Selain itu, dengan tidak adanya pembangunan, masuknya para sarjana, pengrajin, tenaga kerja dan modal yang perlu terjadi dari masyarakat lain untuk mendorong pembangunan lebih lanjut mungkin tidak terjadi. Ini mungkin menyulitkan untuk mempertahankan pembangunan

dan pada akhirnya mengarah pada penurunan (Khaldun, I. 2011: 359).

Pengembangan dalam model Ibn Khaldun tidak merujuk hanya pada pertumbuhan ekonomi. Ini mencakup semua aspek dari masing-masing variabel memperkaya variabel yang lain (G, S, N, W, j dan g) dengan demikian berkontribusi pada kesejahteraan atau kebahagiaan orang yang sebenarnya dan memastikan tidak hanya kelangsungan hidup tetapi juga munculnya peradaban. Perkembangan ekonomi tidak dapat ditimbulkan oleh kekuatan ekonomi sendirian dalam isolasi sektor non-ekonomi masyarakat. Perlu dukungan moral, sosial, politik dan demografis. Jika dukungan ini tidak tersedia, pembangunan ekonomi mungkin tidak terpicu, dan jika itu terjadi, itu mungkin tidak berkelanjutan (Khaldun, I. 2011: 286).

Namun, pembangunan tidak mungkin terjadi tanpa keadilan. Namun, keadilan, seperti halnya pembangunan, juga tidak dipahami olehnya dalam pengertian ekonomi yang sempit, tetapi lebih pada rasa keadilan yang lebih komprehensif di semua bidang kehidupan manusia. Keadilan dianggap sangat penting oleh Ibn Khaldun untuk pembangunan sehingga ia memiliki seluruh bagian berjudul "ketidakadilan memicu penghancuran peradaban". Ini adalah alasan mengapa j dan g telah disandingkan dalam diagram di atas. "Sejauh mana hak properti dilanggar menentukan sejauh mana insentif untuk mendapatkan dan memperolehnya pergi". "Jika insentif itu hilang, mereka menahan diri dari penghasilan". Hal ini berdampak buruk pada efisiensi, inovasi, kewirausahaan, dorongan, dan kualitas lainnya, yang pada akhirnya menyebabkan disintegrasi dan penurunan masyarakat (Khaldun, I. 2011: 288).

n. **Peran Kepercayaan Dan Aturan Perilaku Atau Syariah (S)**

Keadilan, bagaimanapun, mengharuskan aturan perilaku tertentu yang disebut institusi dalam Ekonomi Kelembagaan dan nilai-nilai moral dalam pandangan dunia agama. Mereka adalah standar dimana sumber daya manusia atau masyarakat (N) berinteraksi dengan sesama, dan memenuhi kewajiban mereka terhadap satu sama lain (Khaldun, I. 2011: 157). Semua masyarakat memiliki aturan seperti itu berdasarkan worldview mereka sendiri. Basis utama dari aturan-aturan ini dalam masyarakat Islam adalah Syariah (S). "Hukum Allah memerintahkan untuk melakukan yang baik dan melarang melakukan apa yang jahat dan merusak" (Khaldun, I. 2011: 158).

Karena itu, menurut Ibn Khaldun, "untuk kebaikan manusia dan melayani kepentingan mereka". Asal ilahi mereka membawa potensi membantu menumbuhkan keimanan mereka dan berfungsi sebagai pondasi dasar yang kuat untuk menyatukan masyarakat yang luas (Khaldun, I. 2011: 159). Ini dapat membantu mengekang perilaku sosial yang berbahaya, memastikan keadilan (j), dan meningkatkan solidaritas dan rasa saling percaya di antara masyarakat, dengan demikian mendorong pembangunan (g).

Implementasi syariah (S) merupakan keharusan dalam kehidupan masyarakat (N). Namun demikian, Syariah tidak dapat memainkan peran yang berarti kecuali jika diterapkan secara adil dan tidak memihak (Khaldun, I. 2011: 143). Syariah hanya bisa memberikan aturan perilaku, tidak bisa dengan sendirinya menegakkannya. Merupakan tanggung jawab otoritas politik (G) untuk memastikan kepatuhan melalui insentif dan pencegahan.

o. **Peran Otoritas Kedaulatan/Negara atau Politik (G)**

Ibnu Khaldun menekankan bahwa sebuah Otoritas Kedaulatan/Negara atau Politik (G) harus memiliki semua aspek kebaikan dan keadilan berdasarkan tututan agama dan politik. ia harus memenuhi seluruh kewajibannya, harus toleran, dapat dikritik, mudah ditemui masyarakat,

memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, memenuhi segala kekurangan dan keluh-kesah masyarakat terutama kepada kalangan masyarakat miskin, menghapus ketidakadilan, penindasan, kecurangan dan korupsi (Khaldun, I. 2011: 465).

Bagi Ibn Khaldun, keberadaan sebuah negara merupakan sebuah kebutuhan dan keniscayaan. Dikatakan sebuah kebutuhan karena komunitas manusia memerlukan perlindungan, dimana perlindungan ini bukan hanya perlindungan dari binatang buas namun juga perlindungan dari sikap serakah manusia yang lain. Dikatakan keniscayaan, karena manusia adalah makhluk yang berpolitik (berorganisasi) (Khaldun, I. 2011: 468).

Negara diperlukan agar masyarakat manusia terorganisir dengan baik, sehingga peradaban akan berkembang dengan pesat dan dengan sendirinya perekonomian akan tumbuh dan berkembang seiring adanya tuntutan kehidupan yang lebih sempurna dari masyarakat tersebut. Agar masyarakat manusia terorganisir dengan baik dan peradaban berkembang, negara dalam menjalankan pemerintahannya harus dapat menempatkan diri bagi berkembangnya sebuah peradaban. Di antaranya: penegak keadilan, pengakuan dan perlindungan atas kepemilikan properti rakyatnya, pengakuan dan perlindungan atas kebebasan ekonomi, dan perannya sebagai administrator dengan sumber pendapatan hanya dari pajak yang ditarik dari rakyatnya (Khaldun, I. 2011: 488). Oleh karena itu negara memiliki tanggungjawab untuk menghilangkan kemiskinan untuk masyarakatnya.

p. Peran Kekayaan

Pendapatan yang semakin meningkat memiliki peran signifikan dalam mendorong pembangunan ekonomi dan akumulasi kekayaan. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan yang lebih tinggi dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan finansial secara keseluruhan. Sebagai tambahan, kekayaan yang diperoleh dari pendapatan tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar apabila digunakan dalam kegiatan investasi dibandingkan dengan hanya disimpan secara pasif. Dalam konteks ini, investasi memegang peranan penting dalam memaksimalkan potensi kekayaan. Investasi memungkinkan pemanfaatan kekayaan secara optimal dan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi daripada sekadar menahan kekayaan tanpa adanya aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, alokasi kekayaan untuk investasi tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan individu tetapi juga berdampak positif pada perekonomian secara luas (Ahlis Fatoni, Sebastian Herman, Adam Abdullah, 2019:4).

Dari perspektif ekonomi, penggunaan kekayaan untuk investasi memberikan tingkat kegunaan yang lebih tinggi daripada menyimpannya tanpa dioptimalkan. Investasi memungkinkan kekayaan tersebut untuk berfungsi dalam meningkatkan nilai dan menghasilkan return yang dapat digunakan untuk tujuan lain, berkontribusi pada pembentukan modal yang berkelanjutan. Hal ini penting untuk mencapai efisiensi ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, argumen ini menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan yang proaktif melalui investasi untuk mencapai manfaat ekonomi yang lebih besar. Dengan memanfaatkan kekayaan untuk investasi, individu dan masyarakat dapat memperoleh keuntungan yang lebih signifikan dibandingkan dengan hanya menyimpan kekayaan, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.

Peningkatan dalam pendapatan akan memberikan kontribusi dalam pemasukan dan penerimaan pajak dan memungkinkan bagi pemerintah untuk membelanjakan pemasukan tersebut

untuk kesejahteraan rakyat. Dengan hal tersebut maka akan memberikan beberapa peluang-peluang perkembangan ekonomi dan pembangunan sehingga dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyat. Dan dapat memberikan peningkatan pemodal untuk peningkatan pendidikan masyarakat sehingga akan memperkuat modal intelektual sumber daya masyarakat. Ibnu Khaldun menegaskan pentingnya peran investasi dengan mengatakan :” ketahuilah bahwa kekayaan tidak tumbuh manakala ditimbun dan disimpan. Ia akan tumbuh dan berkembang manakala dibelanjakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, untuk diberikan kepada yang berhak, dan menghapuskan kesulitan. Faktor yang menjadi pemicu adalah laju pajak yang rendah, keamanan kehidupan, dan hak milik, dan lingkungan berkembang yang sehat.

4. Relifansi pengentasan kemiskinan Ibnu Khaldun di Indonesia

Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai pengembangan masyarakat melalui Syari’ah memiliki relevansi yang mendalam dalam konteks pengentasan kemiskinan di Indonesia. Syari’ah, menurut Ibnu Khaldun, bukan hanya sekadar seperangkat aturan religius, tetapi juga merupakan sistem yang mengaktifkan seluruh faktor perkembangan dengan kebijaksanaan. Syari’ah berfungsi untuk meningkatkan baik aspek moral maupun material individu, yang pada gilirannya berperan penting dalam dinamika sosial masyarakat. Peningkatan kualitas individu melalui kebijakan Syari’ah dapat menjadi kekuatan pendorong utama dalam mengatasi kemiskinan. Dengan mengacu pada prinsip Syari’ah, masyarakat diharapkan dapat lebih peka terhadap kebutuhan sosial dan meningkatkan praktik tolong-menolong, serta memberikan sedekah dan zakat bagi yang kurang mampu. Hal ini tidak hanya memenuhi kewajiban religius tetapi juga berkontribusi pada pengurangan ketimpangan sosial. Syari’ah mendorong masyarakat untuk melihat kehidupan dari perspektif yang lebih bermakna dan berorientasi pada tujuan yang jelas, sehingga memperkuat solidaritas dan rasa tanggung jawab sosial dalam komunitas.

Selanjutnya, Syari’ah menyediakan kerangka kerja yang mendukung pembangunan dengan menanamkan nilai-nilai moral yang penting. Dengan adanya lembaga-lembaga yang ramah terhadap pembangunan dan sistem yang berorientasi pada moral, Syari’ah menciptakan iklim yang kondusif untuk ketaatan masyarakat. Hal ini berpotensi mengubah karakter masyarakat menjadi lebih produktif dan berdaya saing, sehingga membantu mengatasi kemiskinan melalui pembangunan berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip Syari’ah juga berdampak pada sistem politik dengan mendirikan pemerintahan yang berorientasi pada moralitas. Dalam sistem ini, pemimpin, seperti Khalifah, dipilih melalui proses demokratis dan bertanggung jawab kepada rakyat. Keputusan yang diambil oleh pemerintah harus didasarkan pada musyawarah dan perwakilan rakyat. Dengan adanya sistem pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip moral, diharapkan tercipta keadilan dan kesejahteraan yang merata.

Pemerintah diharapkan dapat menciptakan kerangka tata pemerintahan yang baik untuk memastikan keadilan, martabat, dan kesetaraan dalam distribusi manfaat pembangunan. Khususnya bagi kelompok-kelompok yang miskin dan tertindas, penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perhatian dan dukungan yang memadai. Hal ini sejalan dengan prinsip Syari’ah yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Syari’ah juga menetapkan aturan hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak individu dan properti. Dalam konteks ini, penting untuk memberikan status yang lebih tinggi dan lebih terhormat bagi profesi-profesi seperti petani, pengrajin, dan pedagang. Dengan cara ini, masyarakat

dapat menikmati manfaat sosial yang lebih adil dan merata, dibandingkan dengan sistem yang ada pada masa lalu, seperti Mazdean atau tradisi Kristen yang berlaku sebelumnya.

Dengan menerapkan teori model pembangunan Ibnu Khaldun, diharapkan dapat terwujud solusi yang lebih efektif dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Prinsip-prinsip Syari'ah yang berbasis pada moral dan keadilan sosial dapat memberikan panduan bagi kebijakan dan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ini juga berfungsi sebagai landasan untuk reformasi sosial yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada. Secara keseluruhan, relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari peningkatan individu hingga pengembangan sistem pemerintahan dan hukum yang adil. Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam upaya mengatasi kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan adil.

SIMPULAN

Apa yang dilakukan Syari'ah (S) adalah mengaktifkan semua faktor perkembangan dengan kebijaksanaan. Syari'ah berkontribusi pada peningkatan moral dan material individu (N), yang merupakan kekuatan utama di balik naik turunnya masyarakat. Dengan dasar syariah dapat peka dalam bermasyarakat dengan adanya saling tolong menolong dan memberikan sedekah dan zakat bagi masyarakat yang kurang mampu dan Syariah mengubah pandangan mereka terhadap kehidupan dengan menyuntikkan makna dan tujuan ke dalamnya. Syari'ah memberikan lembaga yang ramah pembangunan atau nilai-nilai moral (S) dan juga diciptakan iklim yang tepat untuk ketaatan mereka dengan cara yang membantu mengubah karakter masyarakat itu.

Mendirikan sistem politik yang berorientasi moral di mana Khalifah (presiden) dipilih oleh rakyat, memerintah sesuai dengan keputusan Syura (dewan perwakilan rakyat), dan bertanggung jawab kepada rakyat. Karena itu, Pemerintah harus menciptakan kerangka kerja tata pemerintahan yang baik (G) untuk memastikan keadilan, martabat, kesetaraan, harga diri, dan berbagi manfaat pembangunan oleh semua, terutama yang miskin dan tertindas (j). Itu menetapkan aturan hukum dan memastikan kesucian hidup, kehormatan individu, dan properti. Ini memberi status yang lebih tinggi dan lebih terhormat untuk petani, pengrajin dan pedagang dibandingkan dengan apa yang mereka nikmati di bawah Mazdean atau tradisi Kristen yang berlaku saat itu. Dengan penerapan teori model pembangunan Ibn Khaldun diharapkan dapat menjawab salah satu faktor mengatasi kemiskinan yang ada di Negara Islam dan Negara Indonesia Khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A., & Husenudin, A. (2024). Evaluasi Dampak Upah Minimum Regional dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Reduksi Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat 2019-2023. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(6), 1450-1466.
- Aziz, A., & Firmansyah, R. (2024). Pendampingan Manajemen Keuangan dan Bisnis dalam Pengembangan Agribisnis di Pondok Pesantren CEO Bogor. *TRIMAS: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 25-31.

- Ansori, M. A. Z., Aziz, A., Irmansyah, D., Wati, I., Rahmi, D. A., Latiepah, N. R. P., & Ramadhan, M. A. (2024). Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Mengenai Konsep Penetapan Harga Pasar. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 146-160.
- Khotimah, A. H., Aziz, A., Juwaini, A., & Ramly, A. T. (2022). PENGARUH PELATIHAN, KEPEMIMPINAN, DAN BUDAYA PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT BJB SYARIAH CABANG BOGOR. *JOURNAL ISLAMIC ECONOMICS AD DIWAN*, 1(2), 47-54.
- Syamsuri, S., Aziz, A., Hendri, H., & Ghofur, G. (2021). Islamic Economics in Hegemony of Capitalism and Socialism: A Study of Comparative Analysis. *AL-'IBAR Journal of Islamic Civilization and Development*, 1(1), 87-104.
- Budiarti, S., Roisiyatin, R., Aziz, A., & Masriah, S. (2023). Strategic Dimensions of Islamic Banking: A Focus on Service Quality and Facilities Impacting Savings. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(2).
- Aziz, A. (2017). *Pengaruh implementasi nilai syariah dan karakteristik syariah marketing terhadap kepuasan nasabah pada bank syariah mandiri kcp ambarukmo yogyakarta* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Ahli Fatoni, Sebastian Herman, Adam Abdullah, *Ibn Khaldun Model on poverty: the case of organization of islamic conference (oic) countries*, *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 5, No.2 (2019).
- Khaldun, I. (2011), *Muqaddimah*, Daru ihya' wa turaats al 'arabii, Beirut, Libanon
- Rosenthal, F., 1967. *Ibn Khaldun: The Muqaddimah, An Introduction to History*, Routledge and Kegan Paul, London, first ed., 1958; second ed., 1967
- Chapra, M.U., 2000. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation, Leicester, UK.
- Chapra, M.U. (2001), *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Gema Insani Press, Jakarta (translated by Ihwan Abidin B)
- Ismail R. Al-Faruqi, *The Cultural Atlas of Islam*, (New York; Mac Millan Publicing Company, 1986)
- Bernard Lewis, et.al., *The Encyclopedia of Islam*, vol. VIII, (Leiden: E.J. Brill & London: Luzac&Co,1971)
- Abdullah Mustafa al-Maraghi, *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyin*, terj. Husein Muhammad, (Yogyakarta: LKPSM, 2001)
- Malik, Dahlan. *Pemikiran Politik Ibnu Khaldun: Relevansinya dengan tata kehidupan bernegara era modern*. (Jambi: Sultan thaha press)
- Muhsin Mahdi, *Ibnu Khaldun's Philosophy of History*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1971)
- Abdullah Mustafa al-Maraghi, *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyin*, terj. Husein Muhammad, (Yogyakarta: LKPSM, 2001)
- Ali Audah, *Ibnu Khaldun, Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1982)
- Ali Abdul Wakhid Wafi, *Ibnu Khaldun; Riwayat dan Karyanya*, (Jakarta: PT. Grafika Pers, 1985)
- Ahmad Syafi'I Ma'arif, *Ibnu Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)